



**RENCANA KINERJA  
KECAMATAN PULOKULON  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PULOKULON  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Proses pembangunan diawali sejak tahap perencanaan yang merupakan landasan sekaligus pemandu arah pembangunan guna mencapai dengan tepat pada tujuannya. Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi subkegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, kelompok sasaran, serta pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan secara simultan akan mendorong pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pulokulon.  
Tahap ini dilakukan dengan :
  - a. membentuk Tim Penyusun Renja Kecamatan Pulokulon;
  - b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pulokulon;
  - c. menyusun jadwal pelaksanaan sebagai panduan kerja; dan
  - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Kecamatan Pulokulon.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Pulokulon  
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Pulokulon dan mengevaluasi capaian Renja Kecamatan Pulokulon tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pulokulon.  
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kecamatan Pulokulon, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Grobogan. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Lintas Sektoral.  
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pulokulon.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Pulokulon.  
Tahap ini dilakukan dalam rangka mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Kecamatan Pulokulon disusun dengan sistematika:
  - I. Pendahuluan
  - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
  - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
  - IV. Rencana kerja dan pendanaan
  - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Pulokulon.  
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pulokulon Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12 Nomor Registrasi Provinsi Jawa Tengah 12-338/2021);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

- **Maksud**  
Rancangan Awal Renja Kecamatan Pulokulon disusun sebagai dokumen awal yang selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi rancangan renja dan renja yang menjadi pedoman dan arah bagi Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Pulokulon.
- **Tujuan**  
Rancangan Awal Renja Kecamatan Pulokulon disusun agar tujuan dan sasaran Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 2024 dapat dicapai.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan yang menjadi Acuan
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022**

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada struktur anggarannya memiliki 6 program dan 17 kegiatan serta 72 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
    - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - 1) Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
    - 2) Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
    - 3) Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - 1) Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    - 2) Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
    - 3) Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - 1) Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - 1) Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 1) Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - 2) Subkegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - 1) Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
    - 1) Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia



- 2) Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
    - 1) Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    - 2) Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - 3) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - 4) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - 5) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    - 6) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
    - 7) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
    - 8) Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
    - 9) Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - 5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 6) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 4) Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 6) Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1) Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 2) Subkegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Subkegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Subkegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
  - 2) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3) Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 4) Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

- Penggandaan
- 6) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - 8) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 9) Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Subkegiatan Pengadaan Mebel
  - 4) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - 6) Subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - 7) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 8) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 9) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
- 3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 5) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT**  
**DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI**  
**DENGAN TAHUN 2023**  
**KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan														
Sasaran-1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	skor 73,5	skor 66	skor 66	skor 66	100	skor 68	skor 68	100
						Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko	65%	20%	20%	20%	100	40%	40%	100
7	01	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

7	01	01	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	1.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	14 bulan	14 bulan	100
7	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	1.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	1.02	04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	1.02	06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

7	01	01	2.03	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	10 dokumen	100
7	01	01	2.03	02	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	111 unit	111 unit	111 unit	111 unit	100	111 unit	111 unit	100
7	01	01	2.03	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100	14 orang	14 orang	100
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	30 stel	30 stel	30 stel	30 stel	100	30 stel	30 stel	100
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 stel	30 stel	30 stel	30 stel	100	30 stel	30 stel	100
7	01	01	2.05	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	30 orang	100
7	01	01	2.05	04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	30 orang	100
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	100	35 unit	35 unit	100
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	20 unit	100
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100



7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	12 unit	12 unit	100
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	20 unit	100
7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100	40 unit	40 unit	100
7	01	01	2.06	09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100			100
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan					100			100
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan					100			100
7	01	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
7	01	01	2.07	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	10 unit							100
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100

7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12	12	100
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12	12	100
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12	12	100
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12	12	100
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6	6	100
7	01	01	2.09	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara					100	50	50	100
7	01	01	2.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	12	12	100
7	01	01	2.09	04	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	12 unit	12 unit	100
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
7	01	02			<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

7	01	02	2.01		<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	02	2.01	01	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait ( <b>Musrenbang Kecamatan</b> )	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
7	01	02	2.02		<b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah					100			100
7	01	02	2.02	01	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)					100			100
7	01	02	2.02	02	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah indikator SPM yang didata					100			100
7	01	02	2.02	03	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya dokumen SKM					100			100
7	01	02	2.04		<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	02	2.04	01	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
7	01	02	2.04	02	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
7	01	02	2.04	03	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100

Sasaran-2 : Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan														
7	01	03			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	03	2.01		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	03	2.01	01	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100	14 desa	14 desa	100
7	01	03	2.01	02	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100	14 desa	14 desa	100
7	01	03	2.03		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	14 lembaga	14 lembaga	14 lembaga	14 lembaga	100	14 lembaga	14 lembaga	100
7	01	03	2.03	01	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100	14 orang	14 orang	100
7	01	04			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	04	2.01		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	04	2.01	01	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	04	2.01	02	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	04	2.02		7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100

7	01	04	2.02	01	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	05			<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	05	2.01		<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	05	2.01	01	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	05	2.01	02	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	100	70 orang	70 orang	100
7	01	06			<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	06	2.01		<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	06	2.01	01	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100

7	01	06	2.01	02	7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100	14 desa	14 desa	100
7	01	06	2.01	03	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100	14 desa	14 desa	100
7	01	06	2.01	04	7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100	14 desa	14 desa	100
7	01	06	2.01	05	7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100	14 desa	14 desa	100
7	01	06	2.01	06	7.01.06.2.01.07 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina	14 BPD	14 BPD	14 BPD	14 BPD	100	14 BPD	14 BPD	100
7	01	06	2.01	07	7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya	14 lembaga	14 lembaga	14 lembaga	14 lembaga	100	14 lembaga	14 lembaga	100
7	01	06	2.01	08	7.01.06.2.01.14 Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga)	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100	14 desa	14 desa	100
7	01	06	2.01	09	7.01.06.2.01.16 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulokulon**

Sesuai dengan Keputusan Camat Pulokulon nomor    tahun 2022 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan memiliki 2 IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN**

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Pulokulon	B	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,70)	B (79,70)	B (85,00)	BB (88,75)	BB (88,76)	BB (88,77)
2	Nilai Sakip Kecamatan Pulokulon	B	B (65,00)	B (68,00)	BB (70,00)	BB (72,00)	BB (73,50)	B	B	B (82,70)	B (82,99)



Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2021 dengan kategori B diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas tingkat akuntabilitas /pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*resut oriented government*)..

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	<b>Sangat Memuskan</b>
2	A	> 80 - 90	<b>Memuaskan,</b> memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	<b>Sangat baik,</b> akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60 - 70	<b>Baik,</b> akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	<b>Cukup (memadai),</b> akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	<b>Kurang,</b> sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 - 30	<b>Sangat Kurang,</b> sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerpapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sebagai perbandingan kami tampilkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020 dengan predikat B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	<b>Komponen yang dinilai</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai tahun 2019</b>	<b>Nilai tahun 2020</b>
A	Perencanaan Kinerja	30	20,62	21,00
B	Pengukuran Kinerja	25	16,57	16,62
C	Pelaporan Kinerja	15	9,36	9,52
D	Evaluasi Internal	10	6,06	6,16
E	Capaian Kinerja	20	8,26	9,11
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100	<b>60,87</b>	<b>62,41</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Sedangkan untuk kecamatan Pulokulon bersama 18 kecamatan lainnya untuk saat ini belum dinilai oleh Kabupaten sehingga belum bisa mengisi capaian nilai/skor penilaian SAKIP dari Kabupaten. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran kecamatan Pulokulon telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ;

- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented goverment*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari masing-masing seksi dan subbag sedikit terlambat; dan
- 2) Belum adanya aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja agar memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.

- b. Nilai /skor survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilakukan oleh Pemda merupakan skor survey yang diperoleh oleh OPD yang menjadi obyek pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,7 sementara realisasinya sebesar 88,75 melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten Grobogan; dan
- 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pulokulon dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

**a. Permasalahan Sekretariat**

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

**b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

**c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

**d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat**

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

**e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum**

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

**f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan**

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes

Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
  - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.
  - b. Kurangnya personel menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal.
  - c. Perlunya integrasi system dan data.
  - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
  - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal).
  - b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
3. Isu terkait pelayanan publik.
  - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh(komprehensif) di semua unit pelayanan.
  - b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan adalah Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Pulokulon Kab.Grobogan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif		
						Rp					Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pulokulon	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	70	2.029.313.000	Kecamatan Pulokulon	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	70	2.029.313.000	
				Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100			Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100		
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100		
				Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko	%	60			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko	%	60		
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pulokulon	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	41.000.000	Kecamatan Pulokulon	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	41.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		1		Kecamatan Pulokulon	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		1		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun		1		Kecamatan Pulokulon	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun		1		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		1		Kecamatan Pulokulon	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		1		

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun		1		Kecamatan Pulokulon	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun		1		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen LKJIP tersusun		1		Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen LKJIP tersusun		1		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		1		Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		1		
	1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.250.000.000</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	14	<b>1.250.000.000</b>	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	14	<b>1.250.000.000</b>	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan	12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan	12	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12	-	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun		12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun		12	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	dokumen	12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	dokumen	12	-	



		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	12	-	
	1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik</b>	%	100	-	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik</b>	%	100	-	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	10	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	10	-	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	unit	111	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	unit	111	-	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kecamatan Pulokulon	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	orang	14	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	orang	14	-	
	1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu</b>	%	100	14.500.000	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu</b>	%	100	14.500.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	stel	30	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	stel	30	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pulokulon	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	30	22.998.000	Kecamatan Pulokulon	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	30	22.998.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-	

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-	
	1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>276.815.000</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>276.815.000</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	10	15.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	10	15.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	20	37.315.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	20	37.315.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	10	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	10	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	50	72.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	50	72.000.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	100	17.500.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	100	17.500.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	unit	12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	unit	12	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	20	30.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	20	30.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	60	105.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	60	105.000.000	

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pulokulon	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	unit				Kecamatan Pulokulon	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	unit			
	1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	-		<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	-	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit				Kecamatan Pulokulon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit				Kecamatan Pulokulon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit			
		Pengadaan Mebel	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	10	-		Kecamatan Pulokulon	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	10	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	10	-		Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	10	-	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	unit	10	-		Kecamatan Pulokulon	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	unit	10	-	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	unit		-		Kecamatan Pulokulon	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	unit		-	

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit	1		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	-	
	1.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>133.500.000</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>133.500.000</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan	12	3.500.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan	12	3.500.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	35.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	35.000.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	95.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	95.000.000	

	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pulokulon	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	225.000.000	Kecamatan Pulokulon	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	225.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit	7	25.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit	7	25.000.000	
		Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Mebel terpelihara	unit	50	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Mebel terpelihara	unit	50	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit	12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit	12	-	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	unit	12	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	unit	12	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	192.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	192.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	8.000.000 -	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	- 8.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	-	
2		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pulokulon	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	100	-	Kecamatan Pulokulon	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	100	-	

	2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pulokulon	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%	100	-	Kecamatan Pulokulon	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%	100	-	
		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait <b>(Musrenbang Kecamatan)</b>	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali	1	-	
	2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pulokulon	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	%		-	Kecamatan Pulokulon	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	%		-	
		7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun <b>(SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)</b>	Dok			Kecamatan Pulokulon	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun <b>(SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)</b>	Dok			
		7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah indikator SPM yang didata	Indikator			Kecamatan Pulokulon	Jumlah indikator SPM yang didata	Indikator			
		7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pulokulon	Tersusunnya dokumen SKM	Dok			Kecamatan Pulokulon	Tersusunnya dokumen SKM	Dok			
	2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pulokulon	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%	100	- 8	Kecamatan Pulokulon	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%	100	-	

		7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pulokulon	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	Jenis	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	Jenis	1	-	
		7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jenis	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jenis	1	-	
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan		1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan		1	-	
3		<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Pulokulon	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen	100	-	Kecamatan Pulokulon	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen	100	20.000.000	
	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Keg	100	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Keg	100	-	
		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes	Desa	14	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes	Desa	14	-	
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)		14	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)		14	-	
	3.2	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Pulokulon	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	lembaga	14	-	Kecamatan Pulokulon	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	lembaga	14	-	
		7.01.03.2.06.06 Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kecamatan Pulokulon	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	14	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	14	20.000.000	Analisis kebutuhan Rp 20.000.000 untuk mendanai kegiatan PKK Rakon PKK

													tingkat kecamatan (kegiatan tahunan)
4		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pulokulon	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	persen	100	10.000.000	Kecamatan Pulokulon	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	persen	100	10.000.000	
	4.1	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	10.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	10.000.000	
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	Kegiatan	1	10.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	Kegiatan	1	10.000.000	
		7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kegiatan	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kegiatan	1	-	
	4.2	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pulokulon	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiatan	1	-	Kecamatan Pulokulon	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiatan	1	-	
		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	kegiatan	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	kegiatan	1	-	
5		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pulokulon	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	20.000.000	Kecamatan Pulokulon	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	20.000.000	



	5.1	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pulokulon	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	20.000.000	Kecamatan Pulokulon	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	20.000.000	
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	1	-	
		7.01.05.2.01.02 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pulokulon	Jumlah orang yang mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	50	20.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah orang yang mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	50	20.000.000	
6		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pulokulon	Persentase desa dengan tertib administrasi		100	30.000.000	Kecamatan Pulokulon	Persentase desa dengan tertib administrasi		100	30.000.000	
	6.1	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pulokulon	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	30.000.000	Kecamatan Pulokulon	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	30.000.000	
		7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	1	-	Kecamatan Pulokulon	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	1	-	
		7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	14	15.000.000	Kecamatan Pulokulon	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	14	15.000.000	

[illegible]

Secara umum dari hasil analisis terhadap kebutuhan tahun 2024 tidak terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD. Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah cocok namun ada 3 sub kegiatan yang besarannya berbeda, yakni :

1. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sebesar Rp 20.000.000;

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada tahun 2023 terdapat usulan khusus masyarakat yang masuk terkait dengan Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan nilai usulan Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun**  
**2024 Kecamatan Pulokulon**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kecamatan Pulokulon	Nilai Evaluasi SAKIP	Skor 70	Nilai dikeluarkan oleh Tim Kabupaten

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

###### **3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024**

Prioritas pembangunan daerah memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

###### **1.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema “**Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas..
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung  
Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

###### **1.1.3 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 didahului dengan penggambaran tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan karena penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Visi RPJMD Kabupaten Grobogan 2021-2026 yaitu: **Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya**. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditempuh 5 misi pembangunan meliputi:

**1. Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing**

Tujuan dari misi 1 adalah Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak.

**2. Misi 2: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana**

Tujuan dari misi 2 adalah Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3, dan Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.

**3. Misi 3: Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**

Tujuan dari misi 3 yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah, menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa, Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja.

**4. Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Tujuan dari misi 4 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, Meningkatnya kualitas manajemen ASN.

**5. Misi 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat**

Tujuan dari misi 5 yaitu Terwujudnya Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah, Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024 yaitu: **“Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi”**. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur. Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat.
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)

- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima.
- 8) Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
- 9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.
- 10) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana teruraikan dalam table 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,34 tahun
		Rata-rata lama Sekolah	7,04 tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,14 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Madya (0,6375 – 0,7724)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	87,22%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	92,34%
		Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	76,07 %
		Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	B (0,20- 0,44)
5	Meningkatkan kualitas	Indeks Kualitas Air	Indeks 80,10

	lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3		
		Indeks Kualitas Udara	Indeks 87,15
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks 62,75
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks 46,00
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks 0,68
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,23 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,5 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	1,59 %/tahun
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	1,47 persen
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	870,467 Milyar Rupiah
9	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks 0,70
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,4 %/tahun
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,2 %
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori B (77,70)
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Sangat Inovatif



13	Meningkatnya penerapan egovernment yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks 3,3
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai B (70)
		Level Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
		Opini BPK	Opini WTP
		Indeks sistem merit	Kategori III (250)
13	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	73,85 %
14	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	100%
		Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	100%

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pulokulon

#### 3.2.2. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kecamatan Pulokulon dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Pulokulon Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan maka tujuan Renja Kecamatan Pulokulon tahun 2024 adalah :

**“ Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ”**

#### 3.2.3. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kecamatan Pulokulon dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kecamatan Pulokulon tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Sasaran Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2024**

No	Sasara n	Indikat or	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Nilai B (77,70)
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP (Penilaian tim Kabupaten)	BB (70)

**3.3. Program dan Kegiatan**

3.3.2. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Pulokulon akan melaksanakan 6 program, 16 kegiatan, dan 46 sub kegiatan.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024**

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**KABUPATEN/KOTA**

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7) Pemeliharaan Mebel
- 8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 9) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

### a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)

### **g.** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### **h.** Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

### a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### b.) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

#### 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

#### 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
  - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
  - 8) Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pulokulon tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan**  
**Kegiatan Perangkat Daerah Tahun**  
**2023 dan Prakiraan Maju 2024**  
**Kecamatan Pulokulon**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN				2.979.744.000				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Kecamatan Pulokulon	skor 73,5	2.832.744.000	Dana Transfer Umum - DAU		skor 73,5	2.029.313.000
						Laporan Keuangan Sesuai SAP		100%				100%	
						Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%	
						Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko		65%				65%	



7	01	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kecamatan Pulokulon	100%		Dana Transfer Umum-DAU		100%	41.000.000
7	01	01	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	Kecamatan Pulokulon	1 dokumen				1 dokumen	
7	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	Kecamatan Pulokulon	1 dokumen				1 dokumen	
7	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	Kecamatan Pulokulon	1 dokumen				1 dokumen	
7	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	Kecamatan Pulokulon	1 dokumen				1 dokumen	
7	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Kecamatan Pulokulon	1 dokumen				1 dokumen	
7	01	01	1.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Kecamatan Pulokulon	1 dokumen				1 dokumen	
7	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kecamatan Pulokulon	100%	1.906.544.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	1.250.000.000

7	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Kecamatan Pulokulon	14 bulan	1.906.544.000	Dana Transfer Umum - DAU		14 bulan	1.250.000.000
7	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Kecamatan Pulokulon	12 bulan				12 bulan	-
7	01	01	1.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pulokulon	12 bulan				12 bulan	-
7	01	01	1.02	04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	Kecamatan Pulokulon	12 bulan				12 bulan	-
7	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	Kecamatan Pulokulon	12 bulan				12 bulan	-

7	01	01	1.02	06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pulokulon	12 bulan				12 bulan	-
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	-
7	01	01	2.03	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kecamatan Pulokulon	10 dokumen				10 dokumen	-
7	01	01	2.03	02	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	Kecamatan Pulokulon	111 unit				111 unit	-
7	01	01	2.03	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kecamatan Pulokulon	14 orang				14 orang	-
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>100%</b>	<b>52.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>100%</b>	<b>14.500.000</b>

7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	Kecamatan Pulokulon	30 stel				30 stel	-
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pulokulon	30 stel	22.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		30 stel	22.998.000
7	01	01	2.05	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pulokulon	30 orang				30 orang	-
7	01	01	2.05	04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pulokulon	30 orang	30.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		30 orang	-
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>100%</b>	<b>241.700.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>100%</b>	<b>276.815.000</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Pulokulon	35 unit	8.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		35 unit	15.000.000

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Pulokulon	10 unit				10 unit	37.315.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Pulokulon	10 unit				10 unit	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Pulokulon	20 unit	80.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		20 unit	72.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Pulokulon	10 unit	14.500.000	Dana Transfer Umum - DAU		10 unit	17.500.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Pulokulon	12 unit	13.200.000	Dana Transfer Umum - DAU		12 unit	-
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Kecamatan Pulokulon	20 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		20 unit	30.000.000
7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pulokulon	40 unit	86.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		40 unit	105.000.000

7	01	01	2.06	09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	Kecamatan Pulokulon	5 unit				5 unit	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>100%</b>	<b>226.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>100%</b>	-
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kecamatan Pulokulon		40.000.000	Dana Transfer Umum - DAU			
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kecamatan Pulokulon						
7	01	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kecamatan Pulokulon	10 unit	75.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		10 unit	-
7	01	01	2.07	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kecamatan Pulokulon	10 unit	36.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		10 unit	-

7	01	01	2.07	05	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	Kecamatan Pulokulon	10 unit				10 unit	-
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	Kecamatan Pulokulon	10 unit				10 unit	-
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Kecamatan Pulokulon	1 unit				1 unit	6.500.000.000
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kecamatan Pulokulon	1 unit				1 unit	-
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kecamatan Pulokulon	1 unit				1 unit	-
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	133.500.000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	Kecamatan Pulokulon	12 bulan	76.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		12 bulan	3.500.000

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pulokulon	12 bulan	18.500.000	Dana Transfer Umum - DAU		12 bulan	35.000.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pulokulon	12 bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		12 bulan	-
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pulokulon	12 bulan	65.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		12 bulan	95.000.000
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>100%</b>	<b>237.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Kecamatan Pulokulon	6 unit	22.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		6 unit	25.000.000
7	01	01	2.09	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Kecamatan Pulokulon						-
7	01	01	2.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Kecamatan Pulokulon	12 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		12 unit	-
7	01	01	2.09	04	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	Kecamatan Pulokulon	12 unit				12 unit	-



7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Kecamatan Pulokulon	1 unit	200.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		1 unit	192.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Kecamatan Pulokulon	1 unit				1 unit	8.000.000
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Kecamatan Pulokulon	1 unit				1 unit	-
7	01	02			<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap</b>	Kecamatan Pulokulon	100%	44.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	-
7	01	02	2.01		<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi</b>	Kecamatan Pulokulon	100%	26.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	-

7	01	02	2.01	01	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Pulokulon	1 kali	26.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		1 kali	-
7	01	02	2.02		<b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>						-
7	01	02	2.02	01	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)	Kecamatan Pulokulon						
7	01	02	2.02	02	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah indikator SPM yang didata	Kecamatan Pulokulon						
7	01	02	2.02	03	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya dokumen SKM	Kecamatan Pulokulon						

7	01	02	2.04		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	Kecamatan Pulokulon	100%	18.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	-
7	01	02	2.04	01	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Pulokulon	1 jenis	18.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		1 jenis	-
7	01	02	2.04	02	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Kecamatan Pulokulon	1 jenis				1 jenis	-
7	01	02	2.04	03	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Kecamatan Pulokulon	1 jenis				1 jenis	-
													20.000.000
7	01	03			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan Pulokulon	100%	20.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	-
7	01	03	2.01		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Kecamatan Pulokulon	100%	20.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	-
7	01	03	2.01	01	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes	Kecamatan Pulokulon	14 desa				14 desa	-

7	01	03	2.01	3	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)	Kecamatan Pulokulon	14 desa	20.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		14 desa	-
7	01	03	2.03		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Kecamatan Pulokulon	14 lembaga				14 lembaga	20.000.000
7	01	03	2.03	01	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	Kecamatan Pulokulon	14 orang				14 orang	10.000.000
7	01	04			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Kecamatan Pulokulon	100%	22.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	10.000.000
7	01	04	2.01		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pulokulon	100%	22.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	10.000.000

7	01	04	2.01	01	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	Kecamatan Pulokulon	1 kegiatan	12.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		1 kegiatan	-
7	01	04	2.01	02	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kecamatan Pulokulon	1 kegiatan	10.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		1 kegiatan	-
7	01	04	2.02		<b>7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>1 kegiatan</b>				<b>1 kegiatan</b>	-
7	01	04	2.02	01	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	Kecamatan Pulokulon	1 kegiatan				1 kegiatan	20.000.000
7	01	05			<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>12 bulan</b>	<b>21.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>12 bulan</b>	<b>20.000.000</b>

7	01	05	2.01		<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>12 bulan</b>	<b>21.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>12 bulan</b>	-
7	01	05	2.01	01	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Pulokulon	1 kegiatan	21.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		1 kegiatan	20.000.000
7	01	05	2.01	02	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pulokulon	70 orang				70 orang	30.000.000
7	01	06			<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa dengan tertib administrasi</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>100%</b>	30.000.000

7	01	06	2.01		<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa dengan tertib administrasi</b>	<b>Kecamatan Pulokulon</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - DAU</b>		<b>100%</b>	-
7	01	06	2.01	01	7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Pulokulon	1 kegiatan	20.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		1 kegiatan	15.000.000
7	01	06	2.01	02	7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pulokulon	14 desa	20.000.000	Dana Transfer Umum - DAU		14 desa	15.000.000
7	01	06	2.01	03	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pulokulon	14 desa				14 desa	-
7	01	06	2.01	04	7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Pulokulon	14 desa				14 desa	-
7	01	06	2.01	05	7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pulokulon	14 desa				14 desa	-

7	01	06	2.01	06	7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina	Kecamatan Pulokulon	14 BPD				14 BPD	-
7	01	06	2.01	07	7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarkat Yang Difasilitasi Tupoksinya	Kecamatan Pulokulon	14 lembaga				14 lembaga	-
7	01	06	2.01	08	7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga)	Kecamatan Pulokulon	14 desa				14 desa	-
7	01	06	2.01	09	7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pulokulon	14 Kegiatan				14 Kegiatan	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **2.1. Catatan Penting**

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Pulokulon Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Pulokulon tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Pulokulon Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2024 Renja Kecamatan Pulokulon terdiri dari 6 program, 16 kegiatan, dan 46 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 2.029.313.000 (Dua milyar dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Rancangan Awal Renja Kecamatan Pulokulon Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja dan terakhir menjadi Renja yang bermanfaat bagi Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Tahun Anggaran 2024.

#### **2.2. Kaidah Pelaksanaan**

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

### **2.3. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mencapai target sasaran Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Pulokulon, Februari 2023



**CAMAT PULOKULON**

**SUDARMOYO, S.SOS, MH**  
**NIP. 196810191988031001**